

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. HASIL PENELITIAN**

##### **1. Gambaran Umum Puskesmas Kedungmundu Kota Semarang**

Puskesmas Kedungmundu merupakan kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Sejak didirikan Tahun 1976, Puskesmas ini bernama Puskesmas Kedungmundu. Pada Tahun 1998 terjadi perubahan Ketatanegaraan dimana adanya Otonomi daerah dan terjadi Pengembangan Wilayah, sehingga Puskesmas ini semula terletak di Kelurahan Kedungmundu Kecamatan Semarang Timur, berubah menjadi terletak di Jl. Sambiroto RT 1 RW 1 Kecamatan Tembalang, dengan jumlah penduduk tahun 2015 sebanyak 112.907 jiwa serta luas wilayah kerja 142.444.890 km<sup>2</sup> terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan yang meliputi :<sup>36</sup>

- a. Kelurahan Kedungmundu
- b. Kelurahan Tandang
- c. Kelurahan Jangli
- d. Kelurahan Sendangguwo

---

<sup>36</sup> Profil Puskesmas Kedungmundu, 2016, Semarang. Hal. 3.

- e. Kelurahan Sendangmulyo
- f. Kelurahan Sambiroto
- g. Kelurahan Mangunharjo

Puskesmas Kedungmundu memiliki 4 (empat) Puskesmas Pembantu (Pustu) yaitu Pustu Sendangguwo, Pustu Sendangmulyo, Pustu Sambiroto dan Pustu Mangunharjo. Sedangkan fasilitas dan peran serta masyarakat meliputi : 90 Posyandu Balita, 44 Posyandu Lansia dengan 465 Kader aktif.<sup>37</sup>

## **2. Struktural Organisasi Puskesmas Kedungmundu**

Sebagaimana peraturan Walikota Semarang No 62 Tahun 2008, yang sudah digunakan terhitung mulai tanggal 24 Desember 2008, tentang Organisasi dan tata kerja pusat kesehatan masyarakat Kota Semarang. Dimana susunan organisasi Puskesmas terdiri dari Kepala Puskesmas, Ka. Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagai berikut :

### **a. Kepala Puskesmas**

Puskesmas Kedungmundu sudah beberapa kali dipimpin oleh seorang kepala Puskesmas yaitu sejak Tahun 1967, sampai dengan periode ini sudah urutan yang ke 13. Pimpinan Puskesmas saat ini di jabat oleh seorang tenaga dokter yang sudah berpengalaman, dimana sebelumnya sudah pernah menjadi kepala Puskesmas di Kota Semarang sejak

---

<sup>37</sup>*Ibid*, Hal. 4.

tahun 2005, sedangkan menjadi kepala Puskesmas Kedungmundu sejak Februari 2014.

**b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

Keberadaan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas di Kota Semarang mulai di jabat tenaga struktural sejak Tahun 2009. Sedangkan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Kedungmundu di pegang oleh seorang Tenaga Kesehatan Masyarakat, yang diangkat oleh Walikota Semarang sejak Tahun 2010.

**c. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Puskesmas.<sup>38</sup>

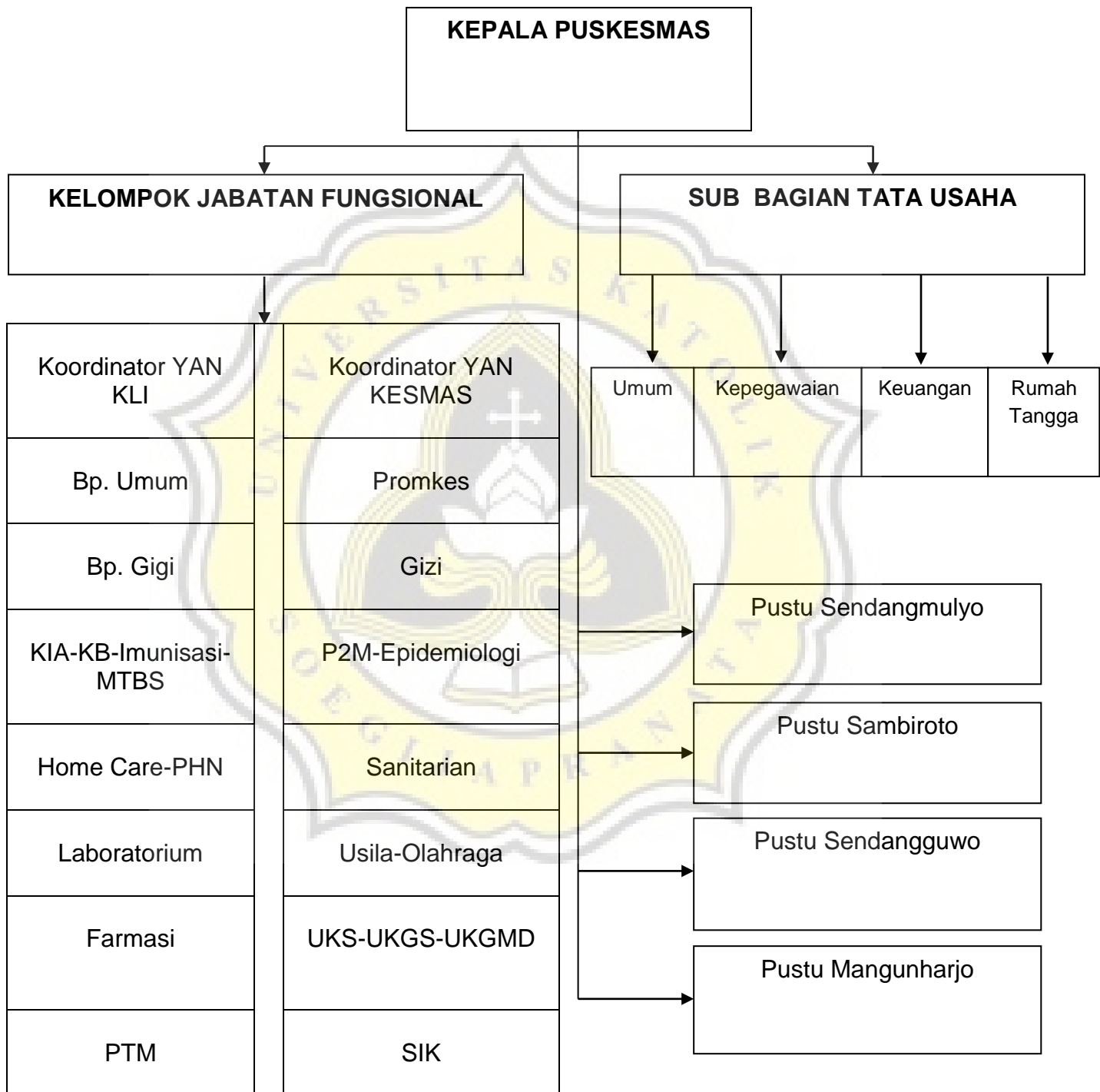
Struktrur Organisasi Puskesmas Kedungmundu sebagai berikut :

---

<sup>38</sup>*Ibid*, Hal. 5-6

### Bagan 3.1

#### Struktur Organisasi Puskesmas Kedungmundu



Sumber Data : Puskesmas Kedungmundu Tahun 2016

Puskesmas Kedungmundu memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Kepala Puskesmas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Semua Sumber Daya Manusia di Puskesmas Kedungmundu berjumlah 35 orang dengan rincian sebagai berikut :<sup>39</sup>

Tabel 3.1 Data Pegawai Puskesmas

No	Data Pegawai	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Puskesmas	1	S1 Kedokteran
2	Ka Sub Bag TU	1	S2
3	Dokter Umum	4	S1 Kedokteran
4	Dokter Gigi	1	S1 Kedokteran Gigi
5	Bidan	5	3 DIII dan 2 DIV
6	Perawat Umum	7	DIII
7	Perawat Gigi	3	DIII
8	Epedemiolog	1	S1
9	Sanitarian	1	S1
10	Penyuluh Kesehatan	1	S1
11	Analisis Kesehatan	2	SMK, DIII
12	Apoteker	1	S1 + Profesi
13	Asisten Apoteker	1	DIII
14	Nutrisionis	1	DIII
15	Administrasi Umum	2	SLTA
16	Petugas Loker	2	SLTA
17	Sopir	1	SLTA

Sumber Data : Puskesmas Kedungmundu Tahun 2016

<sup>39</sup>*Ibid*, Hal. 7.

Pelaksanaan kesehatan lingkungan dijalankan dibawah unit sanitarian, dimana program yang dilakukan meliputi konseling, inspeksi kesehatan lingkungan, intervensi kesehatan lingkungan.

### **3. Hasil Wawancara Dengan Narasumber Di Puskesmas Kedungmundu Kota Semarang**

#### **a. Kepala Puskesmas**

Wawancara kepada Kepala Puskesmas Kedungmundu Kota Semarang dr. Tuti Setywati dilakukan pada tanggal 25 Juni 2016.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas Kedungmundu sesuai dengan Permenkes No 13 Tahun 2015 sudah dilaksanakan sejak diberlakukannya Permenkes tersebut. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas Kedungmundu dilaksanakan oleh seorang koordinator sanitarian. Ketentuan kesehatan lingkungan dilaksanakan berdasarkan lingkup jenis penyakit yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan.

Pembagian tugas dalam pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas dibagi sesuai tugas pokok masing-masing seperti adanya rujukan pasien penderita penyakit berbasis lingkungan dari BP dilayani dokter umum, adanya konseling dari petugas kesehatan lingkungan di Puskesmas

kepada pasien rujukan dari BP, kunjungan rumah terhadap pasien yang sudah dikonseling oleh tenaga sanitarian.

Upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas meliputi konseling, inspeksi kesehatan lingkungan, dan intervensi kesehatan lingkungan. Di Puskesmas Kedungmundu Kota Semarang konseling dalam kesehatan lingkungan dilaksanakan kepada masyarakat yang datang berobat ke Puskesmas Kedungmundu maupun petugas Puskesmas yang mendatangi masyarakat di lapangan.

Inspeksi kesehatan lingkungan dilakukan dengan cara menerjunkan petugas sanitarian ke masyarakat untuk melihat langsung dan mengamati kondisi kesehatan lingkungan di masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas Kedungmundu berdasarkan Permenkes No 13 Tahun 2015. Perbaikan dan pembangunan sarana diperlukan apabila pada hasil inspeksi kesehatan lingkungan menunjukkan adanya faktor risiko lingkungan penyebab penyakit dan/atau gangguan kesehatan pada lingkungan dan/atau rumah pasien. Perbaikan dan pembangunan sarana dilakukan untuk meningkatkan akses terhadap air minum, sanitasi, sarana perumahan, sarana pembuangan air limbah dan sampah, serta sarana kesehatan

lingkungan lainnya yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan lingkungan. Dalam pelaksanaannya intervensi kesehatan lingkungan harus mempertimbangkan tingkat risiko berdasarkan hasil inspeksi kesehatan lingkungan. Pada prinsipnya pelaksanaan intervensi kesehatan lingkungan dilakukan oleh pasien sendiri. Dalam hal cakupan intervensi kesehatan lingkungan menjadi luas, maka pelaksanaannya dilakukan bersama pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat/swasta.

Hasil wawancara dengan kepala Puskesmas Kedungmundu diketahui bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan lingkungan yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung terhadap penyelenggaraan kesehatan lingkungan di Puskesmas Kedungmundu meliputi tersedianya tenaga sanitarian dengan kualifikasi pendidikan Sarjana yang melebihi syarat minimal kualifikasi tenaga sanitarian yaitu Diploma. Faktor penghambat dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan di Puskesmas Kedungmundu Kota Semarang meliputi kurangnya peralatan laboratorium yang memadai dalam melakukan pemeriksaan kesehatan lingkungan seperti pemeriksaan udara, tanah, suhu yang sulit dan belum memiliki peralatannya.



#### **b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

Wawancara kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Kedungmundu Kota Semarang Ujay Bin Madhani, SKM. MH. Kes dilakukan pada tanggal 26 Juni 2016.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas Kedungmundu sesuai dengan Permenkes No 13 Tahun 2015 sudah dilaksanakan sejak di Undangkan dan selagi penyesuaian dengan Permenkes No 13 Tahun 2015. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas Kedungmundu dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dari semua pemegang program dengan terlaksananya program berdasarkan tupoksi masing-masing, yang di maksud tugas pokok dari petugas sanitarian disini yaitu pelaksana hygiene dan sanitasi, dan tugas integrasinya meliputi : membantu kegiatan program DB, pengelolaan kesehatan lingkungan Puskesmas Kedungmundu dan pustu-pustu, membantu pelayanan di loket pendaftaran pasien, penyuluhan kesehatan dan penanggulangan KLB, koordinator SIMPUS dan pelayanan posyandu. Ketentuan kesehatan lingkungan dilaksanakan berdasarkan lingkup jenis penyakit, lingkup tenaga sanitarian, promkes, P2M & Balai Pengobatan.

Pembagian tugas dalam pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas dibagi meliputi adanya penemuan kasus dari

Balai Pengobatan, penanggulangan penyakit oleh tenaga surveilan, penyebar luasan informasi kesehatan oleh tenaga promkes, penanganan kesehatan lingkungan oleh tenaga sanitarian.

Unit bidang yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kesehatan lingkungan di Puskesmas Kedungmundu dilakukan oleh tenaga kesehatan fungsional sanitarian sebagai koordinator. Dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan lingkungan dilihat dari segi form pelacakan sudah tersedia format-format lacakan, segi dana ada bantuan transportasi dari BOK, peralatan dukungan dari laboratorium, sedangkan untuk menguji kualitas lingkungan seperti kebisingan, kelembaban. Pemeriksaan langsung kualitas udara, air dan tanah belum ada.

Kebijakan dalam pelaksanaan Permenkes No 13 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan di Kota Semarang berupa penyesuaian antara aturan lama dan aturan baru, terutama pada form-form pelacakan dan isian kegiatan menggunakan form lama.

Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Kedungmundu diketahui bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan lingkungan yaitu faktor pendukung

dan faktor penghambat. Faktor pendukung terhadap penyelenggaraan kesehatan lingkungan di Puskesmas Kedungmundu meliputi tersedianya tenaga sanitarian dengan kualifikasi pendidikan Sarjana yang melebihi syarat minimal kualifikasi tenaga sanitarian yaitu Diploma. Faktor penghambat dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan di Puskesmas Kedungmundu Kota Semarang hambatan yang ada tidak begitu berarti, karena juklak dan juknis kegiatan sudah ada pedoman permenkes tadi, namun karena ruangan Puskesmas terbatas, hambatan terjadi pada pelayanan yang tidak maksimal.

**c. Petugas Sanitarian**

Wawancara kepada Petugas Sanitarian Puskesmas Kedungmundu Kota Semarang Carolien Juliarsi Dyah M. SKM dilakukan pada tanggal 26 Juni 2016.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas Kedungmundu sesuai dengan Permenkes No 13 Tahun 2015 sudah dilaksanakan sejak bulan Maret Tahun 2015 atau sejak diberlakukannya Permenkes tersebut. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas Kedungmundu dilaksanakan oleh seorang petugas sanitarian. Ketentuan kesehatan lingkungan dilaksanakan berdasarkan penemuan kasus di BP, MTBS, Laboratorium, untuk penanganan kesehatan lingkungan yang berkaitan

dengan penyakit dikerjakan oleh lintas program yang berbasis lingkungan dilakukan oleh tenaga sanitarian.

Pembagian tugas dalam pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas dibagi tenaga promkes memberikan penyuluhan, petugas surveilans melakukan survey atau penyelidikan penyakit, petugas BP, KIA (perawat dan bidan) bertugas merujuk ke klinik sanitarian. Kebijakan yang dilakukan di puskesmas kedungmundu dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan, dilakukan sesuai dengan format-format yang masih berlaku, ruangan kesehatan lingkungan sudah ada tetapi ketika untuk pelayanan konsultasi sanitasi tempat belum maksimal, berkenaan dengan aturan tidak memakai Permenkes No 13 Tahun 2015 tetapi masih pakai SOP klinik Tahun 2005.

Unit bidang yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kesehatan lingkungan di Puskesmas Kedungmundu yaitu petugas sanitarian sendiri. Dukungan prasarana dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan lingkungan berupa ruang konsultasi klinik sanitasi, kendaraan yang disediakan Puskesmas saat harus dilakukan pemeriksaan di rumah pasien.

Hasil wawancara dengan Petugas Sanitarian Puskesmas Kedungmundu diketahui bahwa ada dua faktor yang

mempengaruhi upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan lingkungan yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung terhadap penyelenggaraan kesehatan lingkungan di Puskesmas Kedungmundu meliputi tersedianya tenaga sanitarian dengan kualifikasi pendidikan Sarjana yang melebihi syarat minimal kualifikasi tenaga sanitarian yaitu Diploma. Faktor penghambat dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan di Puskesmas Kedungmundu Kota Semarang meliputi kurangnya peralatan laboratorium yang memadai dalam melakukan pemeriksaan kesehatan lingkungan, gedung pengobatan di Puskesmas yang kurang luas serta tenaga sanitarian yang hanya 1 (satu) orang, karena terbatas petugas sanitarian hanya 1 orang sehingga pelaksanaan kesehatan lingkungan dibantu oleh tenaga epidemiologi dan tenaga lintas program.

Untuk kegiatan yang terkait dengan KIE dilakukan dengan cara mengumpulkan masyarakat di balai desa dengan melibatkan kader kader PKK, RT/RW dan kepala desa setempat. Kegiatan ini dilakukan secara rutin serta saat ditemukan kasus di balai pengobatan petugas sanitarian langsung melakukan inspeksi kesehatan lingkungan.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Ketentuan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Di Puskesmas**

#### **a. Dasar Hukum Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan**

##### **1) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

Pasal 4 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan, hak atas kesehatan yang dimaksud dalam Pasal 4 tersebut adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Selanjutnya pada Pasal 5 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa :

- a) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
- b) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
- c) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Pada Pasal 6 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan di tegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan dan pada pasal 9 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pasal 15 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di tegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pemerintah bertanggung jawab terhadap ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk melaksanakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat di perlukan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah sampai terpencil yang mudah di jangkau oleh seluruh masyarakat agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Puskesmas diselenggarakan sebagai upaya untuk membantu masyarakat agar lebih mudah mendapatkan akses pelayanan kesehatan dalam rangka

meningkatkan derajat kesehatannya karena Puskesmas terletak ditengah-tengah pemukiman sehingga lebih dekat dan terjangkau oleh masyarakat.

## 2) Permenkes No 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas

Bentuk pelayanan kesehatan di lingkungan masyarakat di atur dalam Permenkes No 75 Tahun 2014 Pasal 1 butir (1) menyebutkan bahwa “Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Pasal ini menjelaskan bahwa pemerintah menyediakan fasilitas kesehatan sebagai tempat pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Permenkes No 75 Tahun 2014 Pasal 1 butir (2) tentang Puskesmas menyebutkan bahwa “Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya”.



Upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dalam Pasal 35 meliputi upaya kesehatan masyarakat esensial dan upaya kesehatan masyarakat pengembangan. Upaya kesehatan masyarakat esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a) pelayanan promosi kesehatan.
- b) pelayanan kesehatan lingkungan.
- c) pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana.
- d) pelayanan gizi.
- e) pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.

Upaya kesehatan masyarakat pada ayat (1) harus diselenggarakan oleh setiap Puskesmas untuk mendukung pencapaian standar pelayanan minimal Kabupaten/Kota bidang kesehatan.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa Puskesmas merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang digunakan sebagai tempat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekitar untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

- 3) Permenkes No 43 Tahun 2016 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan.

Pasal 1 Permenkes No 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Salah satu pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga antara lain pelayanan kesehatan lingkungan, adapun ketentuan yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan terdapat pada Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (2) huruf k yaitu Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa Puskesmas merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang digunakan sebagai tempat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekitar untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

- 4) Permenkes No 44 tahun 2016 tentang pedoman manajemen Puskesmas.

Puskesmas sebagai tulang punggung penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di wilayah kerjanya berperan

menyelenggarakan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar memperoleh derajat kesehatan secara optimal tertuang di Permenkes No 44 Tahun 2016 tentang pedoman manajemen Puskesmas.

Pemahaman akan pentingnya manajemen Puskesmas, telah diperkenalkan sejak tahun 1980, dengan disusunnya buku-buku pedoman manajemen Puskesmas, yang terdiri atas paket lokakarya mini Puskesmas tahun 1980, pedoman stratifikasi Puskesmas tahun 1984 dan pedoman *microplanning* Puskesmas tahun 1986.

Pedoman *microplanning* Puskesmas tahun 1986, digunakan untuk acuan menyusun rencana 5 tahun Puskesmas yang tercantum pada Pasal 1 yang diprioritaskan untuk mendukung pencapaian target lima program KB-kesehatan terpadu, yang terdiri atas kesehatan ibu dan anak (KIA), KB, gizi, imunisasi dan diare.

Untuk ruang lingkup kinerja Puskesmas, pencapaian cakupan pelayanan kesehatan antara lain pelayanan kesehatan lingkungan yang di atur dalam Permenkes No 13 Tahun 2015. Untuk terselenggaranya upaya kesehatan bermutu bagi masyarakat Puskesmas harus mampu bekerja baik dan profesional, upaya kesehatan yang

diberikan harus selalu memperhatikan kepentingan, kebutuhan dan harapan masyarakat.

## **b. Bentuk Pengaturan Hukum Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan**

Dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan di Puskesmas mengacu pada Permenkes No 13 Tahun 2015, adapun isi dalam pengaturan pelayanan kesehatan di Puskesmas meliputi penyelenggaraan, sumber daya, pemantauan dan evaluasi dan pencatatan dan pelaporan.

### **1) Penyelenggaraan**

Penyelenggaraan yang dimaksud dalam pelayanan kesehatan lingkungan ini merupakan bagian dari pelayanan kesehatan praripurna yang diberikan kepada pasien. Adapun kegiatan kesehatan lingkungan terdiri dari konseling, inspeksi kesehatan lingkungan, intervensi kesehatan lingkungan. Konseling yang dimaksud dalam penyelenggaraan ini dilakukan kepada pasien yang menderita penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh faktor lingkungan yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan pelayanan pengobatan atau perawatan. Konseling dapat dilakukan tidak hanya kepada pasien yang menderita penyakit namun bisa dilakukan kepada keluarga atau pihak yang mendampingi melalui alat

peraga, percontohan, dan media informasi cetak atau elektronik. Kegiatan konseling ini harus dilakukan setiap hari kerja di Puskesmas.

Setelah dilakukan konseling apabila hasil surveilans kesehatan yang menunjukkan kecenderungan berkembang meluasnya penyakit serta kejadian kesakitan akibat faktor lingkungan, tenaga kesehatan lingkungan harus melakukan inspeksi kesehatan lingkungan terhadap media lingkungan, adapun kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan dilakukan dengan cara pengamatan fisik media lingkungan, pengukuran media ditempat, uji laboratorium dan analisis resiko kesehatan lingkungan.

Hasil dari inspeksi kesehatan lingkungan dapat ditetapkan menjadi intervensi kesehatan lingkungan. Intervensi kesehatan lingkungan dapat dilaksanakan secara mandiri atau berkerja sama dengan pemangku kepentingan dan pihak terkait lainnya. Kegiatan intervensi kesehatan lingkungan dapat berupa komunikasi, informasi dan edukasi serta pengerakan atau pemberdayaan masyarakat, perbaikan dan pembangunan sarana, pengembangan teknologi tepat guna, rekayasa lingkungan. Kegiatan inspeksi dan intervensi kesehatan lingkungan dapat dilaksanakn diluar jam kerja Puskesmas.

## 2) Sumber Daya

Sumber daya untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas harus didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan dan pendanaan yang memadai. Sumber daya manusia paling sedikit 1 (satu) orang tenaga kesehatan lingkungan yang memiliki ijin sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Sarana dan prasarana paling sedikit meliputi :

- a) Ruang untuk konseling yang terintegrasi dengan layanan konseling lain
- b) Laboratorium kesehatan lingkungan yang terintegrasi dengan laboratorium yang ada Puskesmas
- c) Peralatan yang dibutuhkan dalam intervensi kesehatan lingkungan
- d) Media komunikasi, informasi, dan edukasi

Sedangkan pendanaan dibebankan pada anggaran Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

### **3) Pemantauan Dan Evaluasi**

Pemantauan dan evaluasi dibebankan pada tanggung jawab kepala Puskesmas dalam rangka menjaga mutu pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas, yang mencakup pelayanan kesehatan lingkungan dan pelaksanaan program pengawasan kualitas media lingkungan. Hasil pemantauan dan evaluasi dibahas dalam pertemuan integrasi lintas program Puskesmas secara berkala serta menjadi indikator dalam penilaian akreditasi Puskesmas.

### **4) Pencatatan Dan Pelaporan**

Pencatatan dan pelaporan wajib dicatat dalam lembar status kesehatan lingkungan pasien. Lembar status tersebut berupa resume/kesimpulan hasil konseling, hasil inspeksi, dan intervensi kesehatan lingkungan yang dilakukan terhadap pasien. Dalam sistem pelaporan, Puskesmas wajib melaporkan kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan secara berkala Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang kemudian dapat dijadikan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan kesehatan lingkungan dalam skala Kabupaten/Kota.

## **2. Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Pelayanan Kesehatan Lingkungan Di Puskesmas Terhadap Ispa, Diare, Dermatitis**

Berdasarkan hasil penelitian upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas Kedungmundu Kota Semarang ini difokuskan pada 3 (tiga) penyakit dengan angka kejadian tertinggi yaitu ispa, diare dan dermatitis dilakukan sebagai berikut :

### **a. Kegiatan Kesehatan Lingkungan**

Pelaksanaan kesehatan lingkungan di Puskesmas Kedungmundu dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas Kedungmundu Kota Semarang dilakukan melalui beberapa tahapan meliputi :

#### **1) Konseling**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyelenggaraan konseling di Puskesmas Kedungmundu terhadap 3 (tiga) penyakit ispa, diare dan dermatitis dilakukan dengan cara mengidentifikasi temuan penyakit terlebih dahulu, yaitu melalui data pasien yang telah melakukan pemeriksaan dibalai pengobatan minimal 3 (tiga) kali, setelah itu pasien dirujuk kepada petugas sanitarian baru melakukan konseling.



Konseling dilakukan perpasien tapi kenyataan penyakit masih banyak sedangkan tenaga sanitarian hanya 1 (satu) orang dengan penyakit ispa, diare, dermatitis masih tinggi. Hal ini menyebabkan konseling kepada masyarakat belum berhasil, meskipun sudah dilakukan konseling. Konseling ini sudah dilakukan Puskesmas namun dari data yang diperoleh angka penyakit ispa, diare dan dermatitis masih tinggi. Untuk penyakit diare dan dermatitis materinya berkaitan dengan sumber air, kandang ternak satu ruangan dengan rumah dan jamban sedangkan untuk penyakit ispa materinya berkaitan dengan kebersihan udara biasanya spesikasinya ventilasi rumah.

Konseling penyakit ispa yang dilaksanakan antara lain menanyakan adakah batuk dan kesukaran bernafas, lama sakit, jumlah yang sakit, keadaan pintu/jendela, lubang penghawaan, luas rumah, bahan bakar masak, cerobong asap, kebiasaan tidur, perilaku batuk. Dan untuk masalah yang terjadi antara lain tingkat hunian rumah padat, ventilasi rumah/dapur tidak memenuhi syarat, dan perilaku. Berdasarkan hasil penelitian di Puskesmas Kedungmundu petugas sanitarian sudah melakukan konseling sesuai isi Permenkes namun dari segi masyarakatnya yang belum sadar akan perilaku hidup sehat.

Konseling penyakit diare yang harus ditanyakan antara lain makanan yang dimakan sebelum sakit, sumber air bersih, tempat buang air besar, pemilikan jamban, memasak air, dan memberi asi. Dan masalah yang terjadi antara lain penyediaan air tidak memenuhi syarat, pembuangan kotoran tidak saniter dan perilaku tidak higienis. Dari hasil penelitian di Puskesmas kedungmundu petugas sanitarian sudah melakukan konseling kepada masyarakat, namun ada beberapa kendala karena kurangnya dukungan dari masyarakat yang tidak melaksanakan saran yang telah diberikan misalnya cuci tangan sebelum makan atau menyiapkan makanan, cuci tangan pakai sabun setelah buang air besar, jangan makan jajanan yang kurang bersih.

Konseling penyakit dermatitis yang dilaksanakan antara lain menanyakan sumber air bersih, tempat mandi, kebiasaan mandi, kebiasaan buang air besar, penggunaan pakaian, kebersihan tangan dan kuku. Dan masalah yang terjadi antara lain penyediaan air tidak memenuhi syarat, kesehatan perorangan jelek, dan perilaku tidak higienis. Dari hasil penelitian petugas sanitarian sudah memberikan konseling kepada masyarakat, namun dalam pelaksanaan konseling disini memiliki kendala diantaranya kesehatan

perorangnya jelek dan perilaku tidak higienis dari masyarakat itu sendiri.

## 2) Inspeksi Kesehatan Lingkungan

Berdasarkan Permenkes No 13 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan dilakukan dengan pengamatan fisik media lingkungan, uji laboratorium atau analisis resiko kesehatan lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian di Puskesmas Kedungmundu untuk kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan untuk penyakit diare dan dermatitis meliputi sumber air, jamban, kebiasaan BAB dan kebersihan tangan dan kaki. Sedangkan untuk inspeksi penyakit ispa dengan mengamati frekuensi batuk atau kesukaran bernafas, lama sakit, sirkulasi udara dirumah. Dengan demikian puskesmas kedungmundu sudah melakukan kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan sesuai dengan Permenkes. Namun inspeksi tersebut belum optimal hal ini diketahui data diperoleh masih tingginya angka penyakit tersebut. Karena dari masyarakat yang kurang mementingkan kesehatan dan tidak ada perubahan walaupun sudah dilakukan konseling.

### 3) Intervensi Kesehatan Lingkungan

Berdasarkan Permenkes No 13 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas tercantum dalam Pasal 9 ayat (3) yaitu dalam melaksanakan program kesehatan atau pengawasan kualitas media lingkungan, tenaga kesehatan lingkungan berhak atas akses informasi yang diperlukan, akses memasuki tempat yang dicurigai memiliki potensi berkembangnya faktor risiko lingkungan dan pengambilan dan pengujian sampel media lingkungan dan/atau spesimen biomarker.

Berdasarkan hasil penelitian di Puskesmas Kedungmundu intervensi kesehatan lingkungan sudah dilaksanakan. Dalam melaksanakan program kesehatan atau pengawasan kualitas media lingkungan penilaian media air petugas sanitarian mengukur jarak sarana air bersih dengan sumber pencemaran, dan mengambil sampel air bersih untuk diperiksa di laboratorium. Apabila hasil analisis faktor risiko lingkungan dalam pelaksanaan intervensi kesehatan lingkungan menunjukkan besar dan luasnya potensi risiko sampai di luar wilayah kerjanya, tenaga kesehatan lingkungan sudah menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

setempat melalui kepala Puskesmas untuk dilakukan intervensi kesehatan lingkungan secara terintegrasi. Dalam hal intervensi kesehatan lingkungan secara terintegrasi memerlukan koordinasi lintas sektor, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat wajib melaporkan kepada Bupati/Walikota.

#### **b. Sumber Daya**

##### **1) Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia untuk petugas sanitarian dijelaskan dalam Permenkes No 13 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas paling sedikit 1 (satu) orang tenaga kesehatan lingkungan yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan hasil penelitian, petugas sanitarian di Puskesmas Kedungmundu Kota Semarang sudah memenuhi standar dengan kualifikasi pendidikan Sarjana yang melebihi syarat minimal kualifikasi tenaga sanitarian yaitu Diploma dan sudah teregistrasi.

##### **2) Sarana Dan Prasarana**

Sarana dan prasarana di Puskesmas dijelaskan dalam Permenkes No 13 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan di

Puskesmas paling sedikit meliputi : ruang untuk konseling yang terintegrasi dengan layanan konseling lain, laboratorium kesehatan lingkungan yang terintegrasi dengan laboratorium yang ada di Puskesmas, peralatan yang dibutuhkan dalam intervensi kesehatan lingkungan, dan media komunikasi, informasi dan edukasi.

Diketahui dari hasil penelitian, sarana dan prasarana di Puskesmas Kedungmundu Kota Semarang sudah tersedia ruang untuk konseling, laboratorium kesehatan lingkungan yang ada di Puskesmas, peralatan yang dibutuhkan dan media komunikasi, informasi dan edukasi.

### 3) Pendanaan

Pendanaan Puskesmas dijelaskan dalam Permenkes No 13 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas yang dimaksud disini dibebankan pada anggaran Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Diketahui dari hasil penelitian, dalam sistem pendanaan Puskesmas sudah diberikan oleh pemerintah daerah untuk program kesehatan lingkungan di wilayah kerjanya berupa sistem kapitasi.

### **c. Pemantauan Dan Evaluansi**

Berdasarkan Permenkes No 13 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) yaitu setiap pasien yang diberikan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas wajib dicatat dalam lembar status Kesehatan Lingkungan Pasien dengan menggunakan contoh sebagaimana terlampir.

Dari hasil penelitian di Puskesmas Kedungmundu inspeksi kesehatan lingkungan sudah dilakukan pemantauan dan evaluasi dengan menggunakan lembar status kesehatan lingkungan pasien merupakan resume/kesimpulan hasil Konseling, hasil inspeksi kesehatan lingkungan yang dilakukan terhadap Pasien, dan Intervensi Kesehatan Lingkungan yang dilakukan. Puskesmas wajib menyampaikan laporan kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan secara berkala kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Laporan kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan merupakan bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan kesehatan lingkungan dalam skala Kabupaten/Kota.

#### **d. Pencatatan Dan Pelaporan**

Pencatatan dan pelaporan di Puskesmas dijelaskan dalam Permenkes No 13 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas meliputi : setiap pasien yang diberikan pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas wajib dicatat dalam lembar status kesehatan lingkungan pasien dengan menggunakan contoh sebagaimana terlampir, lembar status kesehatan lingkungan pasien merupakan resume/kesimpulan hasil konseling, hasil inspeksi kesehatan lingkungan yang dilakukan terhadap pasien dan intervensi kesehatan lingkungan yang dilakukan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Puskesmas Kedungmundu sudah melakukan pencatatan dan pelaporan dari hasil konseling dan inspeksi kesehatan lingkungan yang dilakukan terhadap pasien dan intervensi kesehatan lingkungan yang dilakukan.



### **3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Pelayanan Kesehatan Lingkungan Di Puskesmas Kedungmundu Kota Semarang terhadap Ispa, Diare dan Dermatitis**

#### **a. Faktor Yuridis**

Berdasarkan penelitian di Puskesmas Kedungmundu, faktor yuridis yang mempengaruhi upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas Kedungmundu Kota Semarang terhadap ispa, diare dan dermatitis terdapat pada isi Permenkes No 13 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas. Dijelaskan pada Pasal 12 ayat (2) disini sumber daya manusia sebagaimana dimaksud paling sedikit 1 (satu) orang tenaga kesehatan lingkungan yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangan-Undangan. Dimana di Puskesmas Kedungmundu sudah memiliki 1 (satu) petugas sanitarian namun aturan tersebut menghambat pelaksanaanya, karena tidak ada dorongan untuk menyediakan tenaga sanitarian lebih dari 1 (satu) orang untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan lingkungan, artinya ketentuan minimalnya yang dipenuhi padahal kebutuhannya lebih dari 1 (satu) orang tenaga sanitarian.

## **b. Faktor Sosiologis**

Berdasarkan hasil penelitian, faktor sosiologis yang mempengaruhi upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas Kedungmundu Kota Semarang antara lain :

- 1) Wilayah kerja Puskesmas Kedungmundu yang cukup luas 142.444.890 km<sup>2</sup> terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan yang meliputi: Kelurahan Kedungmundu, Kelurahan Tandang, Kelurahan Jangli, Kelurahan Sendangguwo, Kelurahan Sendangmulyo, Kelurahan Sambiroto, Kelurahan Mangunharjo dengan jumlah penduduk Tahun 2015 sebanyak 112.907 jiwa. Sehingga membutuhkan petugas sanitarian yang banyak.
- 2) Partipasi Masyarakat yang rendah dalam mewujudkan lingkungan yang bersih.
- 3) Edukasi/konseling oleh tenaga sanitarian tidak berjalan lancar karena masyarakat hanya datang ke Puskesmas pada saat sakit.

Berdasarkan 3 (tiga) faktor itu maka secara sosiologi maka akan menghambat pelaksanaan kesehatan lingkungan di Puskesmas Kedungmundu Kota Semarang.

### c. Faktor Teknis

Berdasarkan hasil penelitian ini, faktor teknis yang mempengaruhi ketentuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas untuk mewujudkan upaya peningkatan kesehatan lingkungan di Puskesmas Kedungmundu Kota Semarang di temukan beberapa kendala dari sisi sarana dan prasarana antara lain :

- 1) Kegiatan konseling belum dapat dilakukan dengan baik karena belum ada ruangan tersendiri yang dikhususkan untuk layanan konseling, sementara ini ruangan menyatu dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan petugas lainnya.
- 2) Laboratorium kesehatan lingkungan masih belum ada, dan minimnya kelengkapan peralatan (spesimen). Alat yang akan digunakan untuk pengambilan sampel, alat untuk pengukuran udara dan suhu juga belum tersedia. Jadi petugas hanya melakukan pengamatan dari segi fentilasi dan kelembaban suhu yang di lapangan tersebut.

Berdasarkan 2 (dua) faktor itu maka secara teknis maka akan menghambat pelaksanaan kesehatan lingkungan di Puskesmas Kedungmundu Kota Semarang.